

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke 2 Bulan November 2021 (tanggal 5 s.d. 11 November)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Sri Nurhayati Qodriyatun
Peneliti Madya/Kebijakan Lingkungan
sri.qodriyatun@dpr.go.id



ISU ATAU PERMASALAHAN

Perubahan iklim akibat pemanasan global memunculkan cuaca ekstrim yang sangat berdampak terhadap Indonesia. Akibat cuaca ekstrim, berdasarkan data BNPB kejadian bencana selama Oktober – November 2021 terus terjadi, yaitu banjir (43 lokasi, 56 orang meninggal, 1.136 unit rumah terdampak), longsor (66 lokasi, 2 orang meninggal, 47 unit rumah terdampak), dan puting beliung (44 lokasi dan 391 unit rumah terdampak). Terjadinya banjir dan longsor di banyak wilayah di Indonesia akibat dari rusaknya kawasan hulu akibat alih fungsi lahan. Berdasarkan identifikasi BNPB sejumlah wilayah Indonesia kini rawan terhadap potensi bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Deputi bidang Pencegahan BNPB menyebut populasi yang berpotensi terpapar bahaya tersebut mencapai 100,81 juta jiwa di seluruh Indonesia. Sementara itu, potensi bahaya tanah longsor teridentifikasi di 33 provinsi dengan potensi populasi terpapar mencapai 14 juta jiwa. Perubahan iklim juga meningkatkan terjadinya migrasi penduduk yang akan meningkatkan terjadinya arus urbanisasi masyarakat desa ke kota. Karena perubahan iklim juga berdampak terhadap kehidupan petani dan nelayan. Cuaca ekstrim mengakibatkan seringnya terjadi gagal panen dan nelayan tidak bisa melaut karena ombak yang tinggi. Kondisi tersebut tentunya menyadarkan kita untuk mengubah pola pembangunan, dengan mengurangi emisi karbon.

Indonesia adalah negara ke-8 penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar di dunia, dengan jumlah emisi GRK di tahun 2019 mencapai 1.886.552 GgCo2e. Meskipun tidak sebesar di tahun 2015, namun emisi GRK Indonesia terus naik sejak 2016 hingga saat ini. Adapun sektor yang menyumbang besar emisi GRK adalah dari FOLU (*food and land use*) dan *peat* (lahan basah) sebesar 50%, selanjutnya energi 34%, limbah 7%, pertanian 6%, dan IPPU (proses industri dan penggunaan produk) 3%.

Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement pada tahun 2016, dan dalam KTT COP 26 di Glasgow (31 Oktober – 12 November 2021) Pemerintah Indonesia menyampaikan beberapa hal: (1) menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan negara lain; (2) menargetkan FOLU *net sink* di tahun 2030 rendah karbon dan berketahanan iklim di 2060 atau lebih cepat; (3) menyampaikan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050; (4) mengimplementasi *article 6* Paris Agreement (kerja sama secara sukarela dalam mitigasi perubahan iklim); dan (5) kerja sama internasional sukarela untuk pemenuhan NDC melalui mekanisme pasar dan non-pasar.

Untuk memenuhi komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia berupaya menekan penggunaan energi fosil dan meningkatkan tutupan lahan atau minimal mempertahankan hutan tropis yang ada. Target pemerintah Indonesia adalah total penurunan emisi GRK mencapai 36,72 juta ton CO2e, pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) 10,1 juta ton CO2e, menerapkan efisiensi energi 16,7 juta ton CO2e, melakukan transisi pada bahan bakar rendah karbon 9,56 juta ton CO2e, dan mereklamasi pascatambang sebesar 0,38 juta ton CO2e. Harapannya di tahun 2050 untuk pembangkit energi di Indonesia, pemakaian gas bumi 24%, batubara 25%, minyak bumi 20%, dan energi terbarukan 31%.

Namun pada kenyataannya kebijakan pemerintah malah bertolak belakang. Terjadi peningkatan kebutuhan batubara, jika di tahun 2020 tercatat 104,8 juta ton equivalen minyak (MTOE), naik menjadi 147,5 MTOE pada 2030 dan 255,9 MTOE pada 2050. Demikian juga dengan minyak, terjadi peningkatan kebutuhan. Jika di tahun 2020 kebutuhan minyak mencapai 82 juta barel, naik menjadi 112,9 juta barel pada tahun 2030 dan 242,9 juta barel pada tahun 2050. Padahal produksi minyak Indonesia sudah semakin menipis. Jika pemenuhan kebutuhan minyak ini dipenuhi melalui impor, maka akan mengancam devisa negara. Di sisi lain, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) masih jauh dari harapan. Kebijakan energi kurang mendukung bagi berkembangnya pemanfaatan EBT. Kemudian mengenai tutupan lahan atau mempertahankan hutan tropis, kondisi saat ini banyak Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak. KLHK melaporkan ada 2.000 DAS dari 17.000 yang ada dalam kondisi rusak.



SUMBER

Republika, 6 dan 9 November 2021; Media Indonesia, 6, 7, 9, 11 November 2021; Kompas, 8, 10, 11 November 2021.